

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab ini akan menjelaskan kesimpulan yang berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan serta akan memberikan saran dan kontribusi dari hasil pembahasan penelitian dari Bab sebelumnya.

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, maka kesimpulan yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dalam hal peranannya sebagai koordinator masih sebatas pembangunan sarana dan prasarana pendukung pariwisata yang paling mendasar bagi kebutuhan destinasi pariwisata. Dengan adanya sarana prasarana yang memadai, maka hal ini akan menarik perhatian wisatawan untuk berkunjung ke destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Mandailing Natal, akan tetapi mengingat jumlah destinasi yang ada di Kabupaten Mandailing Natal dari data Dinas Pariwisata tahun 2020 berjumlah 174 destinasi dimana jumlah status Potensi 136 atau 78,16 %, mulai berkembang 29 destinasi atau 16,67 % dan destinasi yang berkembang sebanyak 9 destinasi atau 5,17 % maka peran pemerintah Kabupaten Mandailing Natal masih sangat lemah.
2. Peran pemerintah terhadap pembangunan pariwisata sebagai regulator dapat dilihat dari regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Mandailing Natal tahun 2017-2018 sangat minim mengingat banyaknya regulasi yang masih dalam status draft (prosestahapan legislasidaerah) dan pada umumnya dilakukan secara Top-Down yang menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam hal sebagai regulator masih lemah dan masih merujuk kepada peraturan pusat.
3. Kegiatan pariwisata dapat meningkatkan kontribusinya pada banyak pendapatan dan juga menyediakan kesempatan kerja untuk masyarakat setempat. Berdasarkan peningkatan jumlah tenaga kerja yang bekerja dibidang pariwisata mulai tahun 2012 sampai tahun 2018, namun pada tahun 2019 dan

2020 menunjukkan penurunan tajam, hal ini dikarenakan kondisi Covid -19 yang berimbas pada penurunan jumlah wisatawan dan secara langsung mengakibatkan penurunan jumlah tenaga kerja di dibidang tersebut. Jika kondisi ini tidak segera di atasi, maka berdampak kepada penurunan pendapatan masyarakat khususnya yang bekerja di dibidang pariwisata. Persentase kenaikan jumlah tenaga kerja yang terserap di bidang pariwisata mengalami pluktuasi, persentase tertinggi pada tahun 2014 sebesar 43,37% dan yang persentase terendah pada tahun 2019 sebesar 5,27 dan tahun 2020 sebesar 4,25.

4. Berdasarkan Renstra program, pendanaan, kegiatan, indikator kinerja, Dinas Pariwisata Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2017-2021 terlihat pemerintah Kabupaten Mandailing telah menganggarkan pendanaan yang cukup besar yang dirinci yakni pada tahun 2020 sebesar Rp 30.975.000.000, dengan peningkatan sebesar 5,24% dari tahun 2019 yang berjumlah Rp 29.432.800.000 yang mana tahun 2019 juga terjadi peningkatan sebesar 5,2% dari tahun 2018 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 27.980.200.000. Dengan peningkatan alokasi anggaran setiap tahun menunjukkan kepedulian pemerintah daerah terhadap pembangunan pariwisata di Kabupaten Mandailing.
5. Peran pemerintah Kabupaten Mandailing Natal sebagai promotor terlihat pada meningkatkan pengembangan promosi/pemasaran pariwisata di Kabupaten Mandailing Natal dialokasikan anggaran sebesar Rp 20.205.000.000 dengan rencana program kegiatan promosi pariwisata di kawasan Kabupaten Mandailing Natal seperti wisata religi Pesantren Musthafawiya Purbabaru ke Masjid Agung; Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata; Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata; Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata; Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara antara didalam dan diluar negeri; Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pelaksanaan pemasaran pariwisata; Pengembangan statistik kepariwisataan dan Pengelolaan objek-objek Pariwisata
6. Perencanaan dalam peran pemerintah menggambarkan bahwa perannya masih rendah, hal ini dibuktikan dengan rencana strategik pariwisata dengan realisasi

memiliki persentase yang rendah di bawah 3,00 % (tabel 5,8). Perencanaan yang tertuang pada peraturan di Kabupaten Mandailing Natal masih dalam bentuk draf proses legislasi daerah, hal ini menunjukkan pemerintah memiliki peran yang lemah karena perencanaan merupakan satu kesatuan kegiatan merencanakan, mematuhi dan rencana menuju tujuan pembangunan pariwisata.

7. Sumber daya manusia yang berkualifikasi pendidikan bidang pariwisata hanya 10,52 %, persentase ini sangat rendah dibandingkan jumlah potensi pariwisata di Kabupaten Mandailing Natal dengan jumlah 174 dimana destinasi yang masih berstatus potensi sebanyak 136 atau 78,16 %, destinasi yang sudah berkembang 29 destinasi atau 16,67% serta destinasi yang berkembang berjumlah 9 destinasi atau 5,17 %. Sedangkan investasi pemerintah Kabupaten Mandailing Natal di bidang pendidikan dan pelatihan dari uraian pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan pada tahun 2019 dan tahun 2020 masih rendah. Peran pemerintah di bidang edukasi sangat penting untuk menciptakan keseimbangan kemampuan, keahlian, kualitas dan potensi dalam pengelolaan pariwisata yang berkesinambungan dan untuk perkembangan jangka panjang. Peran edukasi yang dititik beratkan pada pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Mandailing Natal karena masyarakatnya yang religius, tingkat pendidikan yang masih rendah yang dijelaskan pada bab IV bahwa memiliki 118 sekolah tingkat SLTA, 3 Akademi dan 1 Perguruan Tinggi sehingga pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan potensi dan keberadaan pariwisata masih minim. Pendidikan dan pelatihan merupakan prioritas dalam rangka meningkatkan keahlian untuk mengisi posisi pariwisata dalam memiliki pengetahuan untuk mengembangkan pariwisata yang ada di Kabupaten Mandailing Natal.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan sebagai bahan yang dapat dipertimbangkan bagi pihak yang berkepentingan bagi penelitian ini adalah:

1. Pariwisata yang ada di Kabupaten Mandailing Natal memiliki potensi untuk dikembangkan, akan tetapi perlu segera pembenahan dan pembangunan

saran dan prasarana yang lebih memadai agar pembangunan destinasi pariwisata di Kabupaten Mandailing Natal dapat tercapai, untuk itu masukan kepada pemerintah untuk meningkatkan koordinasi sehingga dapat menyediakan dan memperbaiki fasilitas pendukung wisata di setiap Destinasi Pariwisata Kecamatan (DPK).

2. Pendidikan dan pelatihan yang lebih intens untuk dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mandailing Natal sehingga permasalahan rendahnya pengetahuan dan kemampuan serta keahlian dalam pengelolaan destinasi pariwisata dapat tercapai serta kelemahan dan ancaman terhadap pariwisata yang ada dapat teratasi.
3. Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti dan menggali lebih dalam lagi mengenai potensi destinasi pariwisata untuk menjadi prioritas pendapatan bagi daerah Kabupaten Mandailing Natal.

